

Perjalanan Malaysia: Dari Zaman Kemerdekaan Hingga Zaman Modern

Ella Indah Lupita^{1*}, Radit Rachmandani², Nadine Ranthika Putrico³

¹⁻³Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM.15, Mendalo Darat, Kab. Muaro Jambi, Jambi
akbararofah262@gmail.com

Abstract

This article examines Malaysia's journey from gaining independence in 1957 to entering the modern era. The purpose of this article is to analyze Malaysia's political, economic, and social development, as well as the factors underlying its emergence as one of the developing nations in Southeast Asia. Data was collected from books, journals, scientific articles, and other relevant sources using historical methods through a literature review approach. Malaysia has experienced significant development initiatives, such as the National Modernization Program and the New Economic Policy (NEP), have played a crucial role in advancing the country. On the other hand, Malaysia also faces social inequality, issues of multiculturalism, and global competition in the digital age. With these successes and challenges, Malaysia stands as a prime example of a nation that has successfully transformed from a post-colonial state into a modern nation with significant influence in the Southeast Asian region.

Keywords: Malaysia, Southeast Asia, Development, Modernization, Independence

Abstrak

Perjalanan Malaysia sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1957 hingga memasuki era modern dibahas dalam artikel ini. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Malaysia, serta faktor-faktor-faktor yang mendasari kemunculannya sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya dengan menggunakan metode historis melalui pendekatan tinjauan Pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejak memperoleh kemerdekaan, Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan, yang ditandai oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi, serta kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Inisiatif Pembangunan pemerintah, seperti Program Modernisasi Nasional dan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), telah memainkan peran penting dalam memajukan negara ini. Di sisi lain, Malaysia juga dihadapkan dengan ketimpangan sosial, isu-isu multikulturalisme, dan persaingan global era digital. Dengan keberhasilan dan tantangan tersebut, Malaysia merupakan contoh utama negara yang telah berhasil bertransformasi dari negara pascakolonial menjadi negara modern yang telah memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Malaysia, Asia Tenggara, Pembangunan, Modernisasi, Kemerdekaan

Copyright (c) 2026 Ella Indah Lupita, Radit Rachmandani, Nadine Ranthika Putrico

✉ Corresponding author: Ella Indah Lupita

Email Address: akbararofah262@gmail.com (Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM.15, Kab. Muaro Jambi, Jambi)

Received 15 May 2026, Accepted 23 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Malaysia memiliki sejarah panjang sebagai negara merdeka Asia Tenggara. Sebelum memperoleh kemerdekaannya, negara ini berada di bawah pengaruh kolonial Inggris melalui berbagai pemerintahan kolonial yang digunakan di Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Selama bertahun-tahun, kolonialisme membentuk ekonomi, sosial, dan budaya Malaysia.

Malaysia resmi merdeka pada 31 Agustus 1957. Federasi Malaya secara damai memperoleh kemerdekaan dari Inggris berkat diplomasi Tunku Abdul Rahman. Pembangunan negara yang berdaulat dimulai dengan peristiwa ini, yang menandai akhir dominasi colonial (Andaya & Andaya, 2017: 271). Setelah mendapatkan kemerdekaan, Malaysia menghadapi banyak masalah, termasuk kemajuan ekonominya, integrasi etnisnya, dan stabilitas politiknya.

Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaan tahun 1957, mereka terus melakukan perjalanan. Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura bergabung membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Pembentukan federasi ini merupakan langkah penting untuk memperluas wilayah Malaysia dan memperkuat posisinya di Asia Tenggara. Namun demikian, proses tersebut menimbulkan sejumlah masalah sosial dan politik yang mempengaruhi kemajuan negara pada waktu berikutnya (Milne & Mauzy, 1999:24).

Malaysia telah mengalami transformasi besar dari negara agraris menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Berbagai kebijakan Pembangunan diterapkan pemerintah, terutama pada masa kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mendorong modernisasi infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional (Jomo, 2004: 87). Hasil ini menempatkan Malaysia di antara negara berkembang yang cukup maju di Asia Tenggara.

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari perjalanan Malaysia dari kemerdekaannya hingga saat ini, dengan penekanan pada faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Harapannya adalah penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang transformasi Malaysia dari negara pascakolonial menjadi negara modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan studi pustaka. Metode historis dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami perjalanan Malaysia sejak masa kemerdekaan hingga era modern melalui penelusuran peristiwa-peristiwa penting yang terjadi secara kronologis. Dengan metode ini, penulis dapat menelaah perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan Malaysia berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, penulis melakukan seleksi, pengelompokan, dan terhadap analisis informasi yang dianggap paling sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini membantu penulis menyusun pembahasan yang runtut dan tujuan mengenai transformasi Malaysia dari negara pascakolonial menuju negara modern.

HASIL DAN DISKUSI

Latar Belakang Kemerdekaan Malaysia

Selama lebih dari seratus tahun, Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris sebelum memperoleh kemerdekaan. Selama tahun 1800-an, Inggris Raya meningkatkan pengaruhnya di

Semenanjung Malaya dan menguasai wilayah strategis seperti Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura, yang disebut sebagai Negeri-Negeri Selat. Kepentingan perdagangan Inggris di Asia Tenggara mendorong penguasaan tersebut (Andaya & Andaya, 2017: 212).

Industri karet dan pertambangan timah mendorong pertumbuhan Malaya selama periode colonial, namun, perkembangan ini menghasilkan masyarakat yang majemuk karena banyaknya imigran dari Tiongkok dan India yang masuk. Masyarakat Inggris terbelah antara orang Melayu, Tionghoa, dan India karena kebijakan pemisahan sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah negara tersebut (Means, 1976:15).

Pendudukan Jepang di Malaya dari tahun 1942 hingga 1945 melemahkan kekuasaan Inggris dan mendorong nasionalisme Malaya. Ini mengubah keadaan politik setelah Perang Dunia II. Inggris berusaha untuk membentuk Uni Malayan pada tahun 1946 setelah Jepang menyerah, walau bagaimanapun, masyarakat melayu menentang keras kebijakan tersebut karena dianggap akan mengurangi otoritas raja-raja Melayu dan hak-hak pribumi (Cheah, 2002: 94).

Gerakan politik yang lenih terorganisir muncul sebagai hasil dari penolakan terhadap Uni Malayan. Organisasi Nasional Malaysia (UMNO) dibentuk pada tahun 1946 dan dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar. Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Melayu dan menentang kebijakan kolonial Inggris, organisasi ini menjadi kekuatan penting (Andayana & Andayana, 2017:245).

Tekanan politik yang terus meningkat akhirnya mendorong Inggris mengganti Malayan Union menjadi Federation of Malaya pada tahun 1948. Raja-raja Melayu menerima kekuatan yang lebih besar dari sistem baru ini, yang memungkinkan mereka untuk membangun pemerintahan mereka sendiri. Pada masa itu, nasionalisme Malaya semakin kuat karena kerja sama berbagai kelompok etnis dalam Parta Perikatan, yang terdiri dari UMNO, Asosiasi Cina Malaysia (MCA), dan Kongres India Malaysia (MIC).

Nasionalisme yang meningkat menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Malaysia tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok etnis; itu adalah hasil dari kerja sama berbagai kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk melepaskan diri dari kolonialisme Inggris.

Proses Kemerdekaan Malaysia Tahun 1957

Jalan menuju kemerdekaan Malaysia melalui diplomasi dan negosiasi politik. Tunku Abdul Rahman, juga dikenal sebagai "Bapak Kemerdekaan Malaysia", adalah tokoh penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Di bawah kepemimpinannya, Partai Perikatan memenangkan pemilihan umum tahun 1955 dengan kemenangan besar, menunjukkan bahwa orang-orang sangat mendukung rencana kemerdekaan (Milne & Mauzy, 1999: 20).

Keberhasilan ini memberikan Tunku Abdul Rahman legitimasi politik untuk mengirim delegasi kemerdekaan ke London pada tahun 1956. Delegasi tersebut berbicara dengan pemerintah Inggris tentang masa depan Federasi Malaya. Sebagai hasil dari perundingan, Malaya akan memperoleh kemerdekaan penuh pada 31 Agustus 1957 (Parliament of Malaysia, 2025).

Setelah tercapainya kesepakatan, Komisi Reid dibentuk untuk Menyusun konstitusi negara merdeka setelah mencapai kesepakatan. Komisi yang terdiri dari para ahli hukum dari negara-negara Persemakmuran membuat rancangan konstitusi yang menjadi dasar pemerintahan Malaysia saat ini. Kontribusi tersebut menetapkan monarki konstitusional dan sistem demokrasi parlementer sebagai cara pemerintahan negara (Means, 1976:41).

Perjuangan kemerdekaan mencapai puncaknya di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, 31 Agustus 1957. Di hadapan ribuan orang yang hadir dalam upacara bersejarah tersebut, Tunku Abdul Rahman membacakan Proklamasi Kemerdekaan dan menyerukan kata “Merdeka” sebanyak tujuh kali. Menurut Tunku Abdul Rahman (1977: 103), peristiwa ini menandai penutupan kekuasaan kolonial Inggris dan pembentukan Federasi Malaya sebagai negara merdeka.

Kemerdekaan Malaya sangat penting bagi Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berjuang untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Kesuksesan Malaya memperoleh kemerdekaan melalui diplomasi menunjukkan bahwa perjuangan politik dapat dilakukan tanpa perang bersenjata.

Selain itu, kemerdekaan tahun 1957 memainkan peran penting dalam membangun negara Malaysia. Pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pembentukan identitas nasional menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Ini akan memungkinkan negara menjadi rumah bagi populasi etnis yang berbeda.

Pembentukan Federasi Malaysia Tahun 1963

Setelah mendapatkan kemerdekaan, pemerintah Malaya menyadari betapa pentingnya memperkuat posisi politik dan keamanan wilayah tersebut. Oleh karena itu, Tunku Abdul Rahman menyarankan untuk membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei (Background sejarah Malaysia, 2025).

Banyak hal mempengaruhi gagasan ini, pertama, untuk menghadapi ancaman komunisme yang berkembang di Kawasan Asia Tenggara. Kedua, untuk mempercepat proses dekolonisasi wilayah-wilayah Inggris di Borneo. Ketiga, untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik antarwilayah yang memiliki kedekatan geografis dan historis (Andayana & Andayana, 2017: 284).

Komisi Cobbold melakukan berbagai konsultasi politik dan penelitian sebelum pembentukan federasi pada tahun 1962, komisi ini ditugaskan untuk menilai perspektif masyarakat Sabah dan Sarawak tentang rencana pembentukan Malaysia. Hasil laporan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung federasi karena memberikan hak otonomi daerah (Milne & Mauzy, 2021:29).

Pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia secara resmi dibentuk melalui penggabungan Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Pembentukan negara baru tersebut diumumkan melalui Proklamasi Malaysia yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman (Malaysia Agreement, 1963).

Tetapi pembentukan Malaysia menghadapi banyak masalah. Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menentang pembentukan Malaysia dan menerapkan kebijakan Konfrontasi dari

1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menganggap penciptaan Malaysia sebagai neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara (Leifer, 1966:58).

Selain itu, ketidaksepakatan politik dan ekonomi menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara pemerintah pusat Malaysia dan Singapura. Akhirnya, pada tahun 1965, Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka (Mauzy, 1999:34).

Pembentukan Federasi Malaysia menjadi tonggak penting dalam sejarah Malaysia. Itu memperluas wilayah negara, memperkuat posisi geopolitiknya, dan menjadi dasar bagi pembangunan negara modern yang terus berkembang hingga hari ini.

Kondisi Politik Malaysia Pasca Kemerdekaan

Malaysia menghadapi banyak tantangan setakah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, termasuk membangun stabilitas politik dan mempertahankan persatuan masyarakatnya yang terdiri dari berbagai kelompok etnis. Pemerintah adalah demokrasi parlementer dan negara monarki konstitusional. Dalam sistem ini, perdana menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari, sedangkan Yang di-pertuan Agong bertindak sebagai kepala negara (Means, 1976:42)

Pada awal kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman memimpin pemerintahan yang berusaha menciptakan persatuan nasional melalui kerja sama politik antara kelompok etnis yang berbeda. Stabilitas politik Malaysia bergantung pada koalisi Partai Perikatan, yang terdiri dari UMNO, MCA, dan, MIC. Dengan kerja sama, berbagai kelompok masyarakat dapat memiliki representasi dalam pemerintahan. Ini mengurangi kemungkinan konflik sosial (Milne & Mauzy, 1999:21).

Hubungan antaretnis tetap menjadi masalah utama. Ketegangan sosial yang makin meningkatkan selama tahun 60-an disebabkan oleh disparitas ekonomi antara orang Melayu dan non-Melayu. Puncaknya terjadi pada Peristiwa 13 Mei 1969, kerusuhan rasial setelah pemilihan umum. Ratusan orang tewas dalam konflik tersebut yang menjadi salah satu peristiwa politik terpenting di Malaysia (Comber, 1983, hlm. 57).

Pemerintah membentuk majlis gerakan negara (MAGERAN), dipimpin oleh Tun Abdul Razak, sebagai tanggapan atas keadaan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk memperkuat persatuan nasional dan mengurangi perbedaan ekonomi. Langkah-langkah ini membentuk kebijakan membangun nasional dimasa mendatang (Shamsul, 1997, hlm. 242).

Selama dekade 1980-an dan awal 2000-an, Malaysia mengalami stabilitas politik yang relatif kuat dibawah kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Modernisasi negara, Pembangunan infrastruktur, dan peningkatan peran Malaysia dalam politik regional dan internasional adalah tanda-tanda masa pemerintahannya. Malaysia telah diperkuat oleh Mahathir sebagai salah satu negara berkembang Asia Tenggara yang paling berpengaruh (Khoo, 1995, hlm. 88).

Politik Malaysia mengalami transformasi besar selama abad kedua puluh satu. Partai-partai oposisi mulai menantang dominasi koalisi barisan nasional selama beberapa decade. Pemilu 2018 menjadi tonggak sejarah karena barisan nasional kehilangan kekuasaan federal untuk pertama kalinya.

Peristiwa ini menunjukkan persaingan politik dan demokrasi Malaysia yang semakin meningkat (Case, 2019, hlm. 15).

Secara keseluruhan, kemajuan politik Malaysia setelah kemerdekaan menunjukkan kemampuan negara untuk mempertahankan stabilitas pemerintah meski menghadapi berbagai masalah sosial dan etnis yang beragam.

Perkembangan Ekonomi Malaysia

Transformasi ekonomi Malaysia setelah kemerdekaan adalah salah satu keberhasilan terbesar di negara itu. Perekonomian Malaysia masih bergantung pada industri primer, terutama ekspor karet dan timah, saat mencapai kemerdekaan. Struktur ekonomi yang diwariskan dari kolonialisme menyebabkan negara sangat bergantung pada barang ekspor dan pasar internasional (Jomo, 2004, hlm. 63).

Pemerintah Malaysia sadar bahwa ketergantungan terlalu besar pada sektor primer dapat menghambat kemajuan dalam jangka Panjang. Akibatnya, pemerintah mulai menerapkan strategi diversifikasi ekonomi sejak tahun 1970-an melalui industrialisasi dan pengembangan sektor manufaktur. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja baru (Faaland, Parkinson, & saniman, 2003, hlm. 74).

Ekonomi Malaysia berkembang dengan cepat selama pemerintah Mahathir Mohamad. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di Malaysia, khususnya di industry elektronik dan teknologi manufaktur, karena pemerintah mendorong investasi asing langsung (FDI) dan Pembangunan sektor industry yang ditujukan untuk ekspor (Rasiah, 2011, hlm. 28).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pemerintah dapat membangun proyek infrastruktur modern seperti Menara Kembar Petronas, Jalan Tol Utara-Selatan, Bandaraya Putrajaya, dan pengembangan Bandar Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Infrastruktur ini meningkatkan konektivitas nasional dan meningkatkan persepsi Malaysia sebagai negara modern (Bunnell, 2004: 103).

Perekonomian Malaysia menghadapi tantangan besar selama krisis Keuangan Asia 1997-1998. Nilai mata uang ringgit turun drastic, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Namun, dibandingkan dengan negara lain, pemerintah menggunakan control modal dan kebijakan ekonomi nasional yang relative independent. Kebijakan ini mendorong pemulihan Malaysia lebih cepat dari daripada beberapa negara lain di Asia Tenggara (Jomo, 2001: 119).

Malaysia berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang lebih beragam di era modern. Sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan ekonomi digital menjadi sumber pertumbuhan baru selain industri manufaktur. Bank Dunia. [Bank Dunia menyatakan bahwa Malaysia terus berusaha untuk mencapai status negara maju melalui program Pembangunan berkelanjutan. Negara ini masih termasuk kategori upper middle income country.](#)

Kesuksesan ekonomi Malaysia menunjukkan bahwa stabilitas politik, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan investasi dalam sumber daya manusia dapat membawa transformasi ekonomi yang besar.

Perkembangan Pendidikan dan Sosial Malaysia

Sejak kemerdekaan, pemerintah Malaysia telah memprioritaskan pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat identitas nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keragaman etnis, berbagai kebijakan pendidikan dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat integrasi nasional (Lee, 1999, hlm. 52).

Laporan Razak 1956, salah satu kebijakan penting, menjadi dasar sistem pendidikan nasional Malaysia. Studi ini menekankan bahwa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pengantar utama di sekolah dan bahwa sekolah vernakular masih ada di masyarakat Tionghoa dan India. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengimbangi integrasi nasional dengan penghargaan terhadap keragaman budaya (Tan, 2005, hlm. 108).

Pemerintah membangun sekolah, perguruan tinggi, dan universitas negeri pada tahun 1970-an dan 1990-an untuk memperluas akses pendidikan. Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Sains Malaysia adalah beberapa lembaga pendidikan tinggi yang berkembang pesat. Institusi ini memainkan peran penting dalam menciptakan tenaga kerja yang terdidik, yang membantu proses industrialisasi negara (Asma, 2011, hlm. 77).

Perkembangan sosial masyarakat Malaysia mengalami transformasi yang signifikan selain bidang pendidikan. Penduduk berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan sebagai akibat dari urbanisasi yang meningkat. Kota-kota besar seperti George Town, Kuala Lumpur, dan Johor Bahru menjadi pusat perdagangan dan ekonomi yang menarik banyak tenaga kerja dari berbagai wilayah. (Hutchinson, 2018, hlm. 164).

Meningkatnya angka harapan hidup, penurunan tingkat kemiskinan, dan layanan kesehatan yang lebih baik juga menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Jomo (2004, hlm. 98), keberhasilan pembangunan sosial Malaysia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Namun demikian, perkembangan sosial Malaysia juga menghadapi sejumlah tantangan. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, isu kesenjangan pendapatan, urbanisasi yang cepat, dan hubungan antar etnis tetap menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial nasional.

Perkembangan pendidikan dan sosial telah sangat membantu Malaysia berkembang menjadi negara modern. Terbukti bahwa peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional bergantung pada investasi pendidikan yang berkelanjutan.

Modernisasi dan Industrialisasi Malaysia

Salah satu aspek utama perkembangan Malaysia setelah kemerdekaan adalah modernisasi. Modernisasi berjalan seiring dengan industrialisasi yang berkembang pesat selama dekade 1980-an.

Akibatnya, pemerintah terus menerapkan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperluas infrastruktur, dan mendorong inovasi teknologi (Jomo, 2004, hlm. 106).

Sektor pertanian dan pertambangan adalah inti ekonomi Malaysia sebelum industrialisasi berkembang. Namun, perubahan dalam strategi pembangunan mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang memproduksi komponen teknologi seperti elektronik, mobil, dan lainnya. Dengan perubahan ini, Malaysia sekarang menjadi salah satu pusat manufaktur Asia Tenggara (Rasiah, 2011, hlm. 42).

Industrialisasi dibantu oleh pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur modern, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri yang dapat menarik investasi dari berbagai negara. Infrastruktur yang memadai meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien (Bunnell, 2004, hlm. 124).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu tanda modernisasi selain pembangunan fisik. Melalui berbagai program nasional, pemerintah mendorong digitalisasi untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam sektor bisnis, pelayanan publik, dan pendidikan. Dengan upaya ini, posisi Malaysia sebagai pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) semakin diperkuat (Hutchinson, 2018, hlm. 188).

Perkembangan sektor industri juga menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Urbanisasi meningkat, kelas menengah berkembang, dan kesempatan kerja di sektor modern semakin luas. Masyarakat Malaysia mulai mengalami perubahan pola hidup yang lebih modern dengan tingkat konsumsi, pendidikan, dan akses teknologi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (Asma, 2011, hlm. 85).

Meski demikian, proses modernisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Persaingan global, ketergantungan terhadap investasi asing, perubahan teknologi yang cepat, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang harus terus dihadapi Malaysia. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa modernisasi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Malaysia.

Secara keseluruhan, modernisasi dan industrialisasi telah menjadi pilar utama dalam perjalanan Malaysia menuju negara modern. Kedua proses tersebut berhasil mengubah struktur ekonomi dan sosial negara sekaligus memperkuat posisi Malaysia dalam perekonomian regional maupun global.

Pendidikan dan kemajuan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan negara. Peningkatan akses ke pendidikan, pembangunan lembaga pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah semua faktor yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, modernisasi dan pembangunan kota telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan rakyat Malaysia.

Faktor utama yang membawa Malaysia ke era modern adalah industrialisasi dan modernisasi. Struktur ekonomi dan sosial sebuah negara telah diubah secara signifikan oleh pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi informasi, dan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa. Meskipun

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan global, kesenjangan sosial, dan perkembangan teknologi yang cepat, Malaysia telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang.

Dengan demikian, perjalanan Malaysia dari masa kemerdekaan hingga zaman modern menunjukkan keberhasilan suatu negara pascakolonial dalam membangun stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pendidikan, serta mewujudkan modernisasi nasional. Pengalaman Malaysia menjadi contoh bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan kepemimpinan yang visioner dapat membawa sebuah negara menuju kemajuan dan meningkatkan perannya di kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Perjalanan Malaysia dari zaman kolonial hingga negara modern menunjukkan proses transformasi yang panjang dan kompleks. Inggris mengontrol Malaysia sebelum kemerdekaan, memengaruhi sistem politik, ekonomi, dan sosial negara. Perjuangan untuk kemerdekaan didorong oleh peningkatan kesadaran nasionalisme setelah Perang Dunia II dan penolakan terhadap Malayan Union.

Kemerdekaan Federasi Malaya pada 31 Agustus 1957 adalah peristiwa sejarah yang signifikan bagi Malaysia. Malaysia berhasil memperoleh kemerdekaan secara damai dari Inggris melalui diplomasi dan negosiasi politik yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Hasil ini membentuk dasar untuk membangun negara yang berdaulat dan membuka banyak pintu untuk kemajuan nasional.

Malaysia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan. Malaysia berkembang dari negara yang bergantung pada pertanian dan pertambangan menjadi negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan dukungan investasi asing, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur, kebijakan pembangunan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Pendidikan dan kemajuan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan negara. Peningkatan akses ke pendidikan, pembangunan lembaga pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah semua faktor yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, modernisasi dan pembangunan kota telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan rakyat Malaysia.

Faktor utama yang membawa Malaysia ke era modern adalah industrialisasi dan modernisasi. Struktur ekonomi dan sosial sebuah negara telah diubah secara signifikan oleh pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi informasi, dan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan global, kesenjangan sosial, dan perkembangan teknologi yang cepat, Malaysia telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang.

Dengan demikian, perjalanan Malaysia dari masa kemerdekaan hingga zaman modern menunjukkan keberhasilan suatu negara pascakolonial dalam membangun stabilitas politik,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pendidikan, serta mewujudkan modernisasi nasional. Pengalaman Malaysia menjadi contoh bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan kepemimpinan yang visioner dapat membawa sebuah negara menuju kemajuan dan meningkatkan perannya di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Sebaiknya untuk mengusulkan kepada pembuat undang-undang dapat megatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach). 2) Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata hendaknya dapat bersikap adil dan bersikap mandiri tanpa adanya intervensi-intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 3) Sebaiknya untuk suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

REFERENSI

- Andaya, Barbara Watson, & Andaya, Leonard Y. 2017. *A History of Malaysia* (3rd Edition). London: Palgrave Macmillan.
- Asma, Abdullah. 2011. *Going Glocal: Cultural Dimensions in Malaysian Management*. Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Management.
- Bunnell, Tim. 2004. *Malaysia, Modernity and the Multimedia Super Corridor*. London: Routledge.
- Case, William. 2019. *Malaysia's 2018 General Election and Reform*. *Asian Affairs*, Vol. 50, No. 1, hlm. 14–30.
- Cheah, Boon Kheng. 2002. *Malaysia: The Making of a Nation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Comber, Leon. 1983. *13 May 1969: A Historical Survey of Sino-Malay Relations*. Singapore: Heinemann Asia.
- Faaland, Just, Parkinson, Jack, & Saniman, Rais. 2003. *Growth and Ethnic Inequality: Malaysia's New Economic Policy*. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
- Gomez, Edmund Terence, & Jomo, K. S. 1999. *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hutchinson, Francis E. 2018. *Malaysia's Development Challenges: Graduating from the Middle*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Jomo, K. S. 2001. *Malaysian Eclipse: Economic Crisis and Recovery*. London: Zed Books.

- Jomo, K. S. 2004. *The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Khoo, Boo Teik. 1995. *Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lee, Molly N. N. 1999. *Education in Malaysia: Towards Vision 2020*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Leifer, Michael. 1966. *Indonesia and the Malaysia Dispute*. London: Oxford University Press.
- Mahathir Mohamad. 1991. *Malaysia: The Way Forward (Vision 2020)*. Kuala Lumpur: Government Printer.
- Means, Gordon P. 1976. *Malaysian Politics*. London: Hodder and Stoughton.
- Milne, R. S., & Mauzy, Diane K. 1999. *Malaysian Politics Under Mahathir*. London: Routledge.
- Parliament of Malaysia. 2025. *History of Independence of Malaya*. Kuala Lumpur: Parliament of Malaysia.
- Rasiah, Rajah. 2011. *Industrialization and Economic Growth in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Shamsul, A. B. 1997. "Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malaysia." Dalam Robert W. Hefner & Patricia Horvatich (Ed.), *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Tan, Y. S. 2005. *Policy Developments in Malaysian Education*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Tunku Abdul Rahman. 1977. *Looking Back*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.